

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *powershare* pada setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen yang ada di daerah. Pemberian otonomi daerah pada kabupaten dan kota bertujuan agar pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, Yulistia (2017).

Pemerintah daerah selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya dalam rangka menciptakan otonomi daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang handal dan relevan untuk menggantikan sistem keuangan lama yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan saat ini, Verawati (2013).

Pemerintah telah mengatur sistem akuntansi pemerintahan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat. Oleh karena itu sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dalam Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang di perlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat di percaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Dalam rangka menetapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi, Janitra (2015). SAKD adalah sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah, dalam hal ini penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas keuangan yang dikelolanya Santosa, (2016).

Akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas dan informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan dengan valid dan dapat diandalkan Andini, (2015).

Sistem akuntansi pada organisasi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD selaku entitas akuntansi akan melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas. Pengembangan sistem akuntansi memerlukan suatu perencanaan dan

pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan.

Keberhasilan suatu implementasi sistem tidak hanya dilihat dari teknis pengembangan dan penguasaan teknis saja, namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi. Suatu studi yang menyelidiki bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, serta struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam organisasi disebut dengan perilaku organisasi. Perilaku mengacu pada apa yang ingin dilakukan oleh orang dalam organisasi, bagaimana orang-orang tersebut dibentuk, dan apa sikap mereka, Yulistia (2017). Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampainnya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri. Menurut Arfianti, (2013).

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang diperlukan publik secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Hal ini akan dapat meminimalkan kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal Budiasih, (2014).

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi merupakan suatu karakteristik seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kompetensi sumber daya manusia sangatlah penting dalam melaksanakan sistem akuntansi. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompotensi dibutuhkan SDM yang berlatar belakang atau memahami bidang akuntansi dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan, begitu pula sebaliknya, apabila bidang akuntansi diisi oleh SDM yang tidak berkompotensi di bidang akuntansi dapat menjadi pengaruh kurangnya pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar Janitra, (2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Yulistia (2017) dan Nurlalela (2010) menunjukkan bahwa pelatihan dan kejelasan tujuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Sedangkan dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian Janitra (2015) dan Verawati (2013) menunjukkan bahwa dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti masih terdapat adanya *research gap* mengenai pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

Jumaili (2015) mengemukakan bahwa penggunaan teknologi dalam sistem informasi perusahaan hendaknya mempertimbangkan pemakai. Tidak jarang ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi sering tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh individu pemakai sistem informasi, sehingga sistem informasi kurang memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia menarik untuk dikaji karena banyak penyimpangan ditemukan oleh BPK-RI dalam pelaksanaan audit laporan keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung. Menurut wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri optimistis seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan 2017. Berkaca pada kinerja laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung 2016, Pemprov Lampung dan 12 kabupaten/kota meraih opini WTP. Ke-12 kabupaten/kota se-Provinsi itu yakni Bandar Lampung, Metro, Tulangbawang, Pringsewu, Mesuji, Way Kanan, Lampung Selatan, Lampung Utara, Tulang bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Barat, dan Pesawaran. Atas opini tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Alfiker Saringoringo menyerahkan piagam penghargaan. Memperoleh opini WTP artinya melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan. Selanjutnya, yang harus dicapai adalah mempertahankan WTP dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yakni penyediaan infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM dan melakukan sinergi yang baik dengan instansi lain seperti BPKP. (<http://www.katalampung.com>).

Fenomena lainnya diperoleh dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kepala Daerah beserta jajarannya, Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan tim pemeriksa berharap opini Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 tersebut dapat ditingkatkan dan lebih baik lagi di Tahun Anggaran 2018. Hal yang lebih penting lagi adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah semakin baik serta opini yang telah dicapai dapat diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, kepala perwakilan juga mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar segera menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. (<http://www.bandarlampung.bpk.go.id>).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Yulistia (2017) yang meneliti tentang analisis faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan dengan objek penelitian badan keuangan daerah pemerintah provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan variabel independen yaitu Sumber Daya Manusia, Alfiana (2017) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Mrarani (2011), penambahan variabel tersebut dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia dalam penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Dan mengganti objek penelitian, yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH”**. Dalam penelitian ini penulis ingin membuktikan bahwa kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh faktor keperilakuan organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
2. Apakah kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
3. Apakah dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
4. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengujian pengaruh berperilaku organisasi yang diukur dengan pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap akuntansi keuangan daerah. Dalam penelitian ini menggunakan objek Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Tengah.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
5. Untuk membuktikan secara empiris apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Praktisi

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambil kebijakan dan memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Tengah di masa yang akan datang, serta memberikan wawasan dan wacana kepada pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntansi pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

1.5.2 Bagi Akademis

Adapun kegunaan akademis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta tambahan literature, terutama mengenai penelitian yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, system pengendalian intern pemerintah, standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Bagi Penulis, dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Bagi Peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang terbatas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis/peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini

dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dalam hipotesa (bila diperlukan).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, mahasiswa mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dalam ketajaman daya pikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahasnya, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II. Mahasiswa diharapkan dapat mengemukakan suatu gagasan/rancangan/model/alat /teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan, yang sekurang-kurangnya terdiri dari; (1) jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis; (2) hal baru yang ditemukan dalam prospek temuan; (3) pemakanaan teoritik dari hal baru yang ditemukan. Saran merupakan implikkasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya memberi saran bagi perusahaan (objek penelitian) dan penelitian selanjutnya, sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN